

# LAPORAN KINERJA **2022**



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



## BAB I

### PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL. Salah satu kantor operasional DJKN yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPKNL Palu yang berkedudukan di Kota Palu dengan wilayah kerja meliputi 13 kota/kabupaten yaitu:

1. Kota Palu,
2. Kabupaten Banggai,
3. Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Kabupaten Banggai Laut,
5. Kabupaten Buol,
6. Kabupaten Donggala,
7. Kabupaten Morowali,
8. Kabupaten Morowali Utara,
9. Kabupaten Parigi Moutong,
10. Kabupaten Poso,
11. Kabupaten Sigi,
12. Kabupaten Tojo Una-Una dan
13. Kabupaten Toli-Toli.

KPKNL Palu merupakan salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado.

KPKNL Palu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Palu menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau penjamin utang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun susunan organisasi KPKNL Palu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;

- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu pada saat ini didukung oleh 32 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, sosial, dan keahlian lainnya.

### A. Peran Strategis

KPKNL Palu sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Palu mempunyai peran/aspek strategis antara lain:

- a. Subbagian Umum yang merupakan bagian penunjang tugas dan fungsi KPKNL dan mempunyai tugas di bidang kepegawaian diantaranya:
  - menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;
  - melaksanakan administrasi kepegawaian seperti DP3, laporan LP2P, dan KP4;

- mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- mengurus permintaan Kartu Taspen, Karpeg, Askes; dan
- menyusun laporan absensi bulan kantor.

Sedangkan di bidang keuangan Subbagian Umum mempunyai tugas:

- menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berdasarkan dana yang tersedia dalam DIPA dan
- menyelenggarakan pembayaran gaji/TKPN dan/atau penghasilan lainnya.

Pada bagian Penatausahaan BMN/Inventaris Kantor serta Pengadaan Barang dan Jasa tugas Subbagian umum adalah:

- menyelenggarakan inventarisasi BMN pada kantor pelayanan;
- menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan barang/jasa keperluan kantor;
- menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang keperluan kantor; dan
- menyusun konsep rencana penghapusan barang inventaris kantor.

Subbagian Umum juga mempunyai tugas dalam bidang Layanan Umum dan Laporan seperti :

- menyelenggarakan urusan surat masuk dan keluar, dan penggandaan;
- menyelenggarakan penyusutan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip;
- melakukan pemasangan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyelenggarakan kebersihan, keamanan dan upacara bendera;
- menyusun bahan masukan konsep rencana strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan; dan melaksanakan pembinaan kepada para pelaksana.

- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada kegiatan utilisasi BMN, pengukuran kinerja BMN, pengamanan BMN, dan penatausahaan BMN. Untuk tahun 2022, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi BMN, evaluasi kinerja BMN, dan sertifikasi terhadap 3395 objek bidang tanah.

- c. Bidang Pelayanan Penilaian, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian BMN dan barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Selain itu KPKNL Palu juga membantu pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), untuk menentukan nilai wajar dalam rangka pemindahtanganan BMD;
- d. Seksi Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian pengurusan piutang Negara/daerah baik kepada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara;
- e. Bidang Pelayanan Lelang, KPKNL Palu memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara adil dan transparan. KPKNL Palu juga terus berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales means auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang dan menyebarluaskan cara penjualan lelang kepada masyarakat luas. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palu berkontribusi dalam pemasukan PNBP berupa bea lelang. Saat ini KPKNL Palu juga sudah mengimplementasikan Lelang Internet (*e-auction*) yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya: lelang menjadi lebih mudah, dapat diakses di manapun dan kapanpun, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi bagi para pesertanya, penawaran

lebih cepat dilakukan karena penawaran lelang dapat dilakukan begitu pengumuman lelang sudah diunggah di situs lelang DJKN ([www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)) dan penawaran langsung diterima dalam hitungan detik, dan yang penting juga *e-auction* ini telah memberikan kontribusi hasil lelang yang lebih optimal dibandingkan dengan lelang konvensional;

- f. Seksi Hukum dan Informasi, memiliki peran melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- g. Seksi Kepatuhan Internal, berperan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional di KPKNL Palu sesuai SK terdiri dari Pejabat Fungsional pelalang dan Penilai, sedangkan Pejabat Juru Sita, Pemeriksa belum menjadi Pejabat Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Palu saat ini didukung oleh 34 orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Palu berdasarkan golongan, gender, dan tingkat pendidikan, dan umur adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja, Eselonisasi, dan Golongan**

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon					Golongan			
		II	III	IV	JF	Non	IV	III	II	I
Kepala Kantor	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Subbagian Umum	8	0	0	1	0	7	0	1	7	0
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	6	0	0	1	0	5	0	4	2	0

Pelayanan Penilaian	4	0	0	0	2	2	0	3	1	0
Seksi Piutang Negara	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0
Pelayanan Lelang	6	0	0	0	4	2	0	5	1	0
Seksi Hukum dan Informasi	4	0	0	1	0	3	0	3	1	0
Seksi Kepatuhan Internal	3	0	0	1	0	2	0	2	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

TABEL 2

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

GENDER	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	0	5	1	0	6
Laki-Laki	0	13	13	2	28
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

TABEL 3

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SD	0	0	0	0	0
SLTP	0	0	0	0	0
SLTA	0	0	2	0	2
D1	0	1	0	0	1
DIII	0	11	0	0	11
D4/S1	0	0	12	0	12
S2	0	0	6	2	8
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

TABEL 4

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
---------------	----------------	--------

	I	II	III	IV	
18-30	0	12	6	0	18
31-40	0	0	8	0	8
41-50	0	0	5	2	7
Diatas 50	0	0	1	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>34</b>

TABEL 5

## Tenaga Fungsional KPKNL Palu

No.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	SK Jafung
1	Juru Sita	2	Belum Jafung
2	Pejabat Lelang	4	Sudah
3	Penilai	2	Sudah
4	Pemeriksa	3	Belum Jafung

**B. Isu Strategis**

Adapun Isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi pada KPKNL Palu dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Isu strategis pada Seksi PKN adalah:

berkoordinasi dengan satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan BMN dan pemanfaatan BMN;

- memberikan bimbingan teknis kepada satker K/L di wilayah Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN secara online;
- memberikan *reward* dan *punishment* kepada satker K/L di wilayah Sulteng terhadap kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pada KPKNL Palu;
- upaya pencapaian manfaat ekonomi Barang Milik Negara dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak dan penghematan biaya (*cost saving*); dan ;

- membantu dan mengkoordinasikan pensertifikatan BMN berupa tanah pada satker di wilayah Sulteng sebanyak 3395 bidang tanah.
- melaksanakan evaluasi kinerja BMN dan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
- Isu strategis pada Seksi Piutang Negara adalah:
  - perlunya segera dilakukan sosialisasi serta upaya penegakan hukum Pengurusan Piutang Negara/Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengingat masih ada SKPD yang belum memahami/mengerti alur Pengurusan Piutang Negara/Daerah dan ;
  - target penyelesaian atas piutang yang tinggi dibandingkan potensi piutang yang dapat tertagih.
- Isu strategis pada Bidang Lelang adalah:
  - mendukung terwujudnya kelancaran pelayanan lelang sebagai salah satu penerimaan PNBPN. Untuk itu perlu mengoptimalkan kinerja para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang dengan memberikan penyegaran bagi para pejabat lelang dan pejabat fungsional pelelang, memberdayakan Balai Lelang, dan memaksimalkan penggunaan aplikasi penunjang lelang (*e-Auction*);
  - mewujudkan keikutsertaan masyarakat luas untuk menggunakan lelang sebagai salah satu sarana jual/beli yang aman, mudah, transparan dan mendapat perlindungan hukum yang pasti dan ;
  - mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara/daerah yang lebih baik khususnya pemindahtanganan BMN dan/atau BMD.
- Isu strategis pada Bidang Penilaian adalah:
  - Penilaian BMN dengan tujuan pengelolaan BMN dalam bentuk pemanfaatan, dan pemindahtanganan, serta turut andil dalam perolehan PNBPN dari pengelolaan BMN tersebut.
  - adanya kepercayaan Aparat Pemeriksa Fungsional pada Pemerintah Daerah yang mempercayakan penilaian BMD dilakukan oleh Penilai KPKNL Palu, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah

mengajukan permohonan penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD. KPKNL Palu dalam melaksanakan penilaian BMD tetap mengedepankan asas profesionalisme dengan mengutamakan tugas dan fungsi penilaian BMN. Dalam kurun waktu 2022 KPKNL Palu telah menyelesaikan permohonan penilaian BMD dengan menerbitkan 96 Laporan Penilaian dengan tujuan penilaian adalah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMD;

- kegiatan pembinaan penilai tetap perlu dilaksanakan agar penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan diklat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi penilaian, diskusi, *peer review*, dan verifikasi kompetensi penilai pemerintah.
- Isu strategis pada Subbagian Umum adalah:
  - berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dalam rangka mendukung layanan unggulannya KPKNL Palu.
  - Dengan diserahkannya gedung perkantoran KPKNL Palu yang berada pada Jalan S. Parman Kota Palu kepada Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah, maka KPKNL Palu harus memindahkan dan menata ulang arsip-arsip yang berada pada gedung tersebut ke gedung arsip yang berada di belakang kantor. Pemindahan, pendataan dan penataan ulang arsip tersebut membutuhkan waktu agar sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.
  - Seiring dengan diterapkannya penggunaan tata naskah dinas secara elektronik maka diperlukan dukungan teknis di jaringan internet yang stabil. Begitu juga dengan pengelolaan arsip elektronik yang berbeda dengan pengelolaan arsip fisik.

- Isu strategis pada Seksi Hukum dan Informasi adalah:
  - mewujudkan kelancaran penanganan/penyelesaian kasus perkara gugatan di pengadilan, penyajian informasi/kehumasan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara yang efektif;
  - mewujudkan pengelolaan data dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang cepat dan akurat, pengawasan sistem aplikasi yang terkendali serta pengelolaan jaringan komunikasi data yang baik sehingga informasi tersaji sesuai kebutuhan dan;
  - melaksanakan proses penerimaan hasil pengurusan piutang dan lelang serta penerimaan negara lainnya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Tantangan/Hambatan

#### a. Luasnya Wilayah kerja.

Luas provinsi Sulteng adalah ± 67.000 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1 Kota dan 12 Kabupaten. KPKNL Palu juga melayani 404 satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga, perbankan, kejaksaan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sehingga koordinasi dengan pihak-pihak tersebut memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, sedang biaya dan SDM yang tersedia terbatas.

#### b. Terbatasnya SDM.

Dengan beban kerja sebagaimana disebutkan pada poin a di atas dan cakupan wilayah yang luas, saat ini KPKNL Palu didukung oleh 34 pegawai, Pegawai tersebut terdiri dari:

- 1 Pejabat struktural eselon III (Kepala Kantor);
- 5 Pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Subbagian), 6 Pejabat Fungsional dan;
- 22 Pelaksana.

- c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran satker dalam pengelolaan BMN karena kurangnya dukungan peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu.
- d. Penerapan tata naskah dinas secara elektronik pada aplikasi Nadine serta pelaksanaan *Join Domain* pada instansi Kemenkeu menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai untuk segera beradaptasi dan merubah pola kerja atau kebiasaan lama.
- e. Belum memadainya infrastruktur dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu seperti jaringan internet yang terkadang terkena kendala jaringan sehingga *bandwidth* menjadi lambat dan komputer pengolah data yang terbatas.
- f. Besarnya Piutang Daerah yang belum diurus sesuai ketentuan peraturan perundangan pada SKPD di Wilayah Sulawesi Tengah. Di samping itu Piutang Negara/Daerah yang telah diproses saat ini, banyak yang tidak didukung dengan kelengkapan data seperti data-data perusahaan bila Debitur/Penanggung Utang berbentuk badan hukum, serta tidak adanya barang jaminan utang. Sebagian debitur/penanggung utang tidak didukung dengan adanya barang jaminan, dari 42 debitur/penanggung utang, hanya terdapat 15 debitur yang memiliki barang jaminan, serta debitur/penanggung utang tidak diketahui keberadaannya / perusahaannya sudah tutup.
- g. Tidak lengkapnya/ tersedianya berkas lelang yang mengakibatkan penanganan perkara di pengadilan menjadi tidak maksimal.
- h. Tidak diketahuinya nama penyeter/penanggung utang pada saat pembayaran angsuran dari penanggung utang melalui rekening bank sehingga berakibat bendahara penerimaan mengalami kesulitan dalam memonitor arus uang yang masuk. Untuk itu diperlukan koordinasi antara Bendahara Penerimaan KPKNL Palu dengan pihak penyerah piutang/kreditur secara berkala melalui rekening bank yang tidak diketahui.
- i. Perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada Pejabat Lelang Kelas I, II, Balai Lelang dan *stakeholder* mengenai peraturan perundang-undangan maupun aplikasi yang menunjang pelayanan seksi lelang. Kurangnya pemahaman pengguna

layanan lelang terhadap pelaksanaan lelang lewat elektronik serta jaringan internet yang tidak lancar membuat pelaksanaan lelang elektronik terkendala. Sulitnya pemenang lelang untuk balik nama kendaraan bermotor dalam pelaksanaan lelang khususnya eksekusi barang rampasan berupa kendaraan yang perolehannya berasal dari pembelian yang dibiayai lewat perusahaan pembiayaan/*Leasing* dan belum lunas karena dokumen kepemilikan (BPKB) dikuasai pihak ke III (perusahaan penyedia jasa pembiayaan).

- j. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dalam rangka penanganan perkara terkait sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas.

#### D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan**, yang menguraikan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Isus*) yang dihadapi organisasi.

**Bab II. Perencanaan Kinerja**, yang menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Palu Tahun 2022.

**Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan:

A. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:

- membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran: Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV. Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang dilakukan KPKNL Palu dalam menentukan strategi untuk melakukan kegiatan sesuai sistem. Untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi agar mempunyai keunggulan kompetitif, KPKNL Palu perlu menetapkan perjanjian kinerja dalam bentuk Kontrak Kinerja dengan seluruh pegawainya. Penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sepanjang tahun berjalan, dilaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi secara berkala atas kinerja masing-masing pegawai dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja.

Bimbingan dan konsultasi tersebut dilakukan oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang. Pada periode tahun berjalan juga dilakukan penilaian kinerja dan penilaian perilaku. Hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan umpan balik untuk proses pembimbingan dan konsultasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pada tahun 2022, KPKNL Palu memiliki 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan uraian dari 11 (Sebelas) Sasaran Strategis. Target dari 19 IKU KPKNL Palu tahun 2022, disajikan pada gambar di bawah ini.



**KONTRAK KINERJA  
NOMOR 8/KN.28/2022**

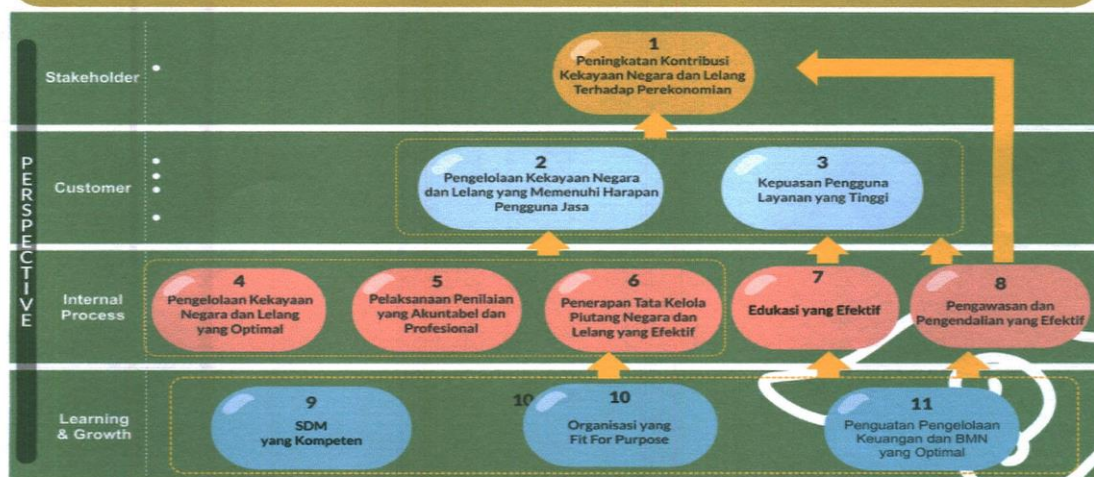
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68 (skala 5)
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89 (skala 100)
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80 (skala 100)
		10b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp287.973.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.654.000,00
2. Pengelolaan Aset	Rp283.319.000,00
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.315.998.000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp30.888.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.265.994.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp2.880.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp16.236.000,00

Manado, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara,  
Tengah, Gorontalo, dan Maluku UtaraKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Palu  
Arif Bintarto Yuwono  
Krisdianto

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian</b>							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,68	4,68
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>7</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
<b>9</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>10</b>	<b>Organisasi yang Fit For Purpose</b>							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
<b>11 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>								
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Manado, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Palu,



Krisdianto

## SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH,  
GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU

PERIODE PENILAIAN:  
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Krisdianto	NAMA	Arif Bintarto Yuwono
NIP	198105242001121001	NIP	197109121997031001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1.1 Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1.2 Persentase produktivitas lelang	36%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pegguna Jasa	2.1 Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pegguna Jasa	2.2 Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100% (Rp1.000.000.000)
5	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,68
6	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.2 Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100% (2.858 Bidang)
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.3 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100% (10 BKPN)
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.4 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% (50 NUP)
10	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
11	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.1 Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.2 Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
13	Edukasi yang Efektif	7.1 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
14	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8.1 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	85%
15	SDM yang Kompeten	9.1 Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
16	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10.1 Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
17	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10.2 Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90

18	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
19	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11.2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
B. KINERJA TAMBAHAN				

Pegawai yang Dinilai,



Krisdianto  
NIP 198105242001121001

Manado, 31 Januari 2022  
Pejabat Penilai Kinerja,



Arif Bintarto Yuwono  
NIP 197109121997031001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI UTARA TENGAH GORONTALO DAN MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian / Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Manado, 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
dan Lelang Palu,



Krisdianto  
NIP 198105242001121001/A

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi (NKO)

Pada subbab ini akan disajikan capaian kinerja organisasi KPKNL Palu untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Adapun Capaian kinerja KPKNL Palu 2022, disajikan pada tabel berikut.

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALU  
PERIODE TRIWULAN IV  
TAHUN 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30.00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120.00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	137.07%	14%	50%	137.07%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	98.51%	14%	50%	273.64%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.87%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	199.53%	14%	50%	199.53%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	181.05%	14%	50%	181.05%	120.00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							104.91%	
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4.68	4.91	21%	100%	104.91%	104.91%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34.31%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							118.24%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	80.92%	14%	24%	124.49%	120.00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	120.22%	19%	33%	120.22%	120.00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	130.00%	14%	24%	130.00%	120.00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	110.74%	11%	19%	110.74%	110.74%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	0.00%	14%	100%	200.00%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100.00%	14%	50%	108.70%	108.70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DIKN	P/M	10%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							106.88%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89.00	95.12	14%	100%	106.88%	106.88%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							112.30%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	95.45%	14%	100%	112.30%	112.30%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34.93%	
9	SDM yang Kompeten							120.00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							114.98%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	95.88	14%	50%	119.85%	119.85%	hijau
11b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90.00	99.09	14%	50%	110.10%	110.10%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							110.71%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	96.85%	14%	50%	101.41%	101.41%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	120.00%	14%	50%	120.00%	120.00%	hijau
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							116.10%	hijau

Mengetahui,  
Kepala KPKNL Palu  
  
Krisdianto

Palu, 12 Januari 2023  
Kepala Sams Kepatuhan Internal,  
  
Bertha

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Three* Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* sebagai berikut :

### **A. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

#### **1. IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang**

- Realisasi capaian IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2022 sebesar Rp.15.393.400.543 (137,07%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp11.230.000.000 (100%), IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang. Realisasi penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang sampai Desember 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- Langkah yang telah diambil diambil untuk mencapai capaian tersebut adalah dengan upaya sosialisasi dan penggalan potensi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dan penjualan BMN kepada para satuan kerja yang intens. Penggalan potensi lelang juga banyak dilakukan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD).

#### **2. IKU Persentase Produktivitas Lelang**

Realisasi frekuensi lelang laku selama tahun 2022 mencapai 764 kali. Persentase capaian produktivitas lelang sebesar 98.51% dari target sebesar 36%. Besaran realisasi yang diperoleh KPKNL Palu sebesar 98,51%, peningkatan persentase produktivitas lelang ini di pengaruhi oleh masifnya penggalan potensi lelang yang dilakukan oleh para pejabat lelang di KPKNL Palu. Dibanding dengan tahun sebelumnya , pada tahun 2022, perekonomian kota Palu semakin pulih dan bertumbuh. Sosialisasi dengan pembeli potensial sebelum pelaksanaan lelang melalui pengumuman pada koran maupun katalog yang dibagikan melalui media sosial juga gencar dilakukan .

### 3. IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Sama halnya dengan kenaikan IKU Capaian Persentase Produktivitas Lelang, Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Palu tahun 2022 mencapai 199,53% (Rp205.513.408.617) dari target yang ditetapkan yaitu senilai Rp103.000.000.000 (100%). Lebih rinci, realisasi pokok lelang terdiri dari realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I senilai Rp.62.005.646.617 dan Pegadaian senilai Rp.143.507.762.000. Capaian ini berhasil diraih oleh KPKNL Palu sejak gencarnya dilakukan penggalian potensi lelang kepada Pemerintah Daerah di Seluruh wilayah kerja KPKNL Palu.

## B. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### 4. IKU Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Realisasi capaian IKU Tingkat Penurunan *outstanding* piutang Negara tahun 2022 sebesar Rp.1.810.548.458 (181,05%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000 (100%) yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan sampai Desember 2022 capaian tingkat penurunan *outstanding* piutang negara telah melampaui target yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi debitur yang kurang kooperatif, dan debitur tidak ditemukan keberadaannya diantaranya dengan optimalisasi upaya penagihan, salah satunya dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

## C. Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan Yang Tinggi

### 5. IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Palu tahun 2022 telah mencapai angka 4,91 (104,91%) diatas target yang ditetapkan sebesar 4,68. Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, KPKNL Palu tahun 2022 lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan SOP layanan unggulan. Survei indeks kepuasan pengguna layanan dilakukan kepada stakeholder dari Seksi Penilaian, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi PKN, dan Seksi Piutang Negara. Selain itu, hal yang harus

diperhatikan agar mendapatkan hasil survey yang diharapkan yaitu menentukan responden dari *stakeholder* dan memastikan kesamaan persepsi *stakeholder* dalam memahami kuesioner.

#### **D. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal**

#### **6. IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Realisasi IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 sebesar 80,92% dari target yang telah ditetapkan 65% (120,49%). Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Hambatan yang dialami yaitu lambatnya pengumpulan form dari satker yang terlibat dalam proses IKU SBSK, tentu saja hal ini diakibatkan satuan kerja yang kurang memahami tatacara pengisian formulir pendataan sehingga diperlukan konfirmasi bahkan diperlukan peninjauan langsung terhadap objek yang dilakukan .

#### **7. IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan**

Jumlah BMN berupa bidang tanah yang telah diidentifikasi telah maupun belum bersertifikat pada kementerian lembaga didasarkan pada data aplikasi SIMANTAP. Pada tahun 2022 target sertifikasi bidang tanah sebanyak 2.858 objek dan telah tercapai sebanyak 3.436 bidang tanah (120,22%). hal ini mencerminkan IKU persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan mengalami kenaikan dalam hal target dan juga pencapaiannya. Hal ini dicapai dengan dilakukannya koordinasi pihak satker dan Kantor Pertanahan secara intens dan upaya updating verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP).

#### **8. IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**

Realisasi persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2022 sebesar 130% dari target 100%, target 10 BKPN dengan capaian penyelesaian 13 BKPN. Hal ini mencerminkan pencapaian IKU telah terpenuhi dengan baik. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mencapai realisasi tersebut yaitu dengan menghubungi penanggung hutang secara intens dan berkoordinasi secara simultan kerjasama dengan beberapa instansi terkait.

### **9. IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Realisasi capaian IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) mencapai sebesar 212 dari target 196, atau sebesar 116,00% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) telah dijalankan dengan baik.

## **E. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian Yang Akuntabel dan Profesional**

### **10 .IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian oleh KPKNL Palu mencapai 0% dari target yang ditetapkan yaitu 19%. Hal ini menggambarkan persentase capaian terhadap target yang positif yaitu mencapai 200%. Capaian ini diraih dengan melakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai. Kendala yang dihadapi selain pandemi yang menyebabkan menurunnya mobilitas pegawai, adalah nilai yang diajukan Satker lebih tinggi daripada nilai wajar yang dihasilkan setelah dilakukan penilaian dan data isian pada form yang disampaikan satker tidak valid (khusus dalam hal penilaian yang tidak dilakukan survei lapangan). Karenanya, perlu dilakukan koordinasi dengan satker terkait permohonan penilaian yang diajukan serta meminta data yang dibutuhkan guna membantu dalam analisa perhitungan nilai dan sosialisasi

## **F. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif**

### **11. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction***

Realisasi IKU capaian persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convention alauction sebesar 108,70% dari target 92% (dengan indeks 108,7%). Hal ini mencerminkan pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tentu pandemi menjadikan semua pengguna layanan agar lelang diselenggarakan secara daring (*e-auction*).

### **12. IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN**

Realisasi IKU capaian Deviasi data PNBPN fungsional DJKN yaitu sebesar 0% dari target sebesar 10%. (Persentase terhadap capaian sebesar 200%). Hal ini dicapai dengan

sosialisasi kepada satker tentang pembukuan data PNBP Biad PN dan Bea Lelang, sebab kurangnya pemahaman satuan kerja terhadap pembukuan data PNBP Biad PN dan Bea Lelang menimbulkan rawannya kesalahan pada proses tersebut oleh satuan kerja.

### **G. Sasaran Strategis Edukasi Yang Efektif**

#### **13. IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 menghasilkan indeks 95,12 dari indeks target sebesar 89, atau sebesar 106,88%. Kegiatan dalam IKU ini meliputi sosialisasi penatausahaan dan pengelolaan BMN yang dilaksanakan oleh seksi PKN maupun terkait lelang yang dilakukan KPKNL Palu oleh Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Piutang Negara serta sebagai narasumber pada sosialisasi yang dilaksanakan beberapa satker K/L maupun pemerintahan provinsi/kota/ kabupaten.

### **H. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

#### **14. IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara**

Realisasi IKU persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2022 adalah sebesar 95,45% (indeks 112,3%) dari target sebesar 86.36%. Dalam hal ini masih adanya , ke-tidak segera-an satker dalam menindak lanjuti Surat Persetujuan yang diterbitkan kerap terjadi dan bahkan masih banyak yang belum menaati peraturan terkait pengelolaan BMN.

### **I. Sasaran Strategis SDM yang Kompeten**

#### **15. IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Realisasi IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2022 adalah sebesar 120% (indeks 120%) dari target sebesar 100%. Hal ini dapat tercapai karena posisi penempatannya telah sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Selain itu kegiatan *sharing knowledge* secara periodik sebagai upaya pemenuhan kompetensi dalm hal jam pelatihan.

### **J. Sasaran Strategis Organisasi yang Fit for Purpose**

#### **16. IKU Nilai Hasil Reviw Pengelolaan Kinerja**

Realisasi nilai hasil review pengelolaan kinerja di tahun 2022 adalah sebesar 95.88 dari target IKU 90 (indeks 119.85%). Hal ini tetap mencerminkan kualitas pengelolaan kinerja di KPKNL Palu sudah baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu pemahaman pegawai atas pengelolaan kinerja berbasis BSC.

#### **17. IKU Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator**

Realisasi indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai pada Q4 yaitu 99.64 sehingga capaian di tahun 2022 adalah sebesar 99.09 dari target IKU 90 (indeks 110,01%). Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar materi yang disampaikan pada saat FGD lebih familiar dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

#### **K.Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal**

##### **18. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Palu telah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 96.85% dari target 95.5%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya mencapai target sebesar 95,65 % dari target 95,5 % (100,16% dari target). Dalam IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen dari capaian SMART DJA dengan bobot 60% dari 99,74% (berdasar capaian SMART DJA 31 Desember 2022) dan IKPA 40% dari 94,92% dengan 13 (tigabelas) hal yang menjadi unsur perhitungan yaitu persentase capaian pengelolaan UP, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, Hal III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian Tagihan, konfirmasi Capaian Output, rekon LPJ, perencanaan Kas, realiasi, pagu Minus, dispensasi SPM.

Selama tahun 2022 KPKNL Palu telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan cukup baik dengan catatan telah berhasil dikarenakan target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 96,85% dari target 95,5%. Pelaksanaan anggaran telah optimal ini harus menjadi evaluasi agar tahun depan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, terencana, dan terorganisir dengan baik serta mengacu pada kontrak kinerja Kemenkeu-*three*. Kendala yang dialami yaitu Nilai penyerapan anggaran atas pagu netto rendah, target IKU yang diamanatkan tidak tercapai. Karena itu, KPKNL Palu melakukan pemetaan RPD ulang, percepatan belanja

modal, dan mengintruksikan seluruh unit untuk membuat rencana kerja perjalanan dinas dan juga melakukan revisi anggaran sesuai arahan terkait pandemi.

Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperlukan dukungan sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan dimaksud. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan KPKNL Palu berasal sepenuhnya dari APBN yang dituangkan dalam DIPA nomor SP DIPA-015.09.2.538002/2022 tanggal 17 November 2021 yang terinci dalam tabel berikut.

No	Uraian	Pagu DIPA	Blokir	Sisa Pagu	Realisasi	
					Rp	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
2	Belanja Barang	1.652.889.000	0	167.586.689	1.485.302.311	89.86%
3	Belanja Modal	0	0	0	0	0
	Total	1.652.889.000	0	1.485.302.311	167.586.689	89.86%

Pada Tahun 2022, KPKNL Palu tidak memiliki DIPA untuk Belanja Pegawai, besarnya realisasi DIPA untuk tahun 2022 adalah sebesar 1.485.302.311,- dari target sebesar 1.652.889.000,-. Realisasi penyerapan DIPA untuk tahun anggaran 2022 dimaksud telah sesuai digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, dan dari aspek keuangan itu sendiri telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara.

### 19. IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Capaian pada IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2022 yaitu 120 % dengan target IKU 100%. IKU ini termasuk IKU Baru pada tahun 2022 dimana kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari dua komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah merupakan amanat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 bahwa Menteri/Pimpinan lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut KPKNL Palu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, yang merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban hasil perjanjian kinerja yang telah disepakati antara pimpinan dan bawahan dari sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan dan penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, dan sekaligus berperan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis KPKNL Palu lima tahunan (2020-2024). Pengukuran kinerja sasaran didasarkan pada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 19 IKU yang merupakan indikator Kontrak Kinerja KPKNL Palu tahun 2022.

Secara umum, seluruh pencapaian sasaran strategis selama tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa ada satu IKU pun yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja secara keseluruhan tersebut merupakan hasil kerja seluruh staf, pegawai dan pejabat di jajaran KPKNL Palu termasuk pegawai pemerintah non pegawai negeri serta pegawai *outsorce*.

Keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- NKO ( Nilai Kinerja Organisasi) KPKNL Palu pada tahun 2022 sebesar 116.10% dimana pada tahun 2022, KPKNL Palu meraih penghargaan sebagai Tiga besar NKO Tertinggi setingkat KPKNL Nasional
- Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2022 sebesar Rp.15.393.400.543 (137,07%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp11.230.000.000 (100%), IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen PNBPN Pengelolaan BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang.
- Penerimaan hasil pengurusan piutang negara terdiri dari Piutang Negara yang berasal dari PNDS dapat dicapai dengan realisasi sebesar 1.810.548.458,- dari target sebesar Rp1.000.000.000,-. Adapun target jumlah BKPN tahun 2022 sebanyak 10 berkas berhasil direalisasikan sebanyak 13 berkas, dengan demikian target persentase hasil pengurusan piutang Negara dapat direalisasikan sebesar 130%. Capaian ini diperoleh dari PSBDT maupun pelunasan hutang oleh debitur, mencapai hasil yang cukup signifikan yang merupakan dampak proses pengurusan piutang yang telah dilakukan KPKNL Palu.
- Persentase penyerapan DIPA tahun 2021 yang mencapai 96,85% dari target 95,5% (Barang). Capaian target berhasil diraih agar untuk tahun depan pelaksanaan persentase penyerapan dapat dilaksanakan dengan eksekusi yang lebih terencana dan terorganisir dengan baik dan mengacu pada kontrak kinerja.

Dengan menganalisa IKU tersebut, maka dapat dibuat *Action Plan* yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja pada KPKNL Palu pada tahun berikutnya. Untuk meningkatkan jumlah frekuensi lelang pada tahun 2022, KPKNL Palu akan melakukan penggalan potensi lelang ke instansi/lembaga yang beragam dan sosialisasi serta penyebaran informasi ke masyarakat umum.

Sedangkan berkaitan dengan pengurusan piutang negara, pada tahun 2023 KPKNL Palu akan lebih mengoptimalkan penegakan hukum dalam pengurusan Piutang Negara Kementerian dan Lembaga dan Piutang Daerah. Khusus Piutang Daerah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Anggota PUPN Cabang yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah yang merupakan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan pada tahun 2023 akan lebih ditingkatkan baik proses penilaian dan pengelolaan maupun edukasi kepada instansi pengguna layanan. Perlu sinergi dalam melakukan peran DJKN dalam pengelolaan BMN sehingga diharapkan memberi dampak bagi penerimaan Negara, dan aset Negara dapat dioptimalkan agar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat

Kiranya Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya, sehingga di masa yang akan datang KPKNL Palu dapat semakin tampak potensinya, meningkatkan kinerjanya, dan makin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang memberikan pelayanan yang profesional.